

POSISI MEDIA DALAM PERANG MELAWAN TERORISME

Oleh: Mubarak, S.Sos, MSi
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Email: mubgabus@gmail.com

A. Pendahuluan

Pasca penyerangan terhadap gedung World Trade Centre (WTC) pada 9 November 2001 Amerika Serikat mendeklarasikan perang terhadap teroris. Istilah tersebut merujuk pada kelompok Al-Qaeda pimpinan Usamah bin Ladin yang dianggap sebagai teroris global. Sejak peristiwa 11 September yang dituduhkan terhadap Al-Qaeda, perang melawan terorisme berskala global dilancarkan dari Washington. Sebagai korban, tidak hanya para teroris, tetapi juga negara yang dituding membantu terorisme, seperti Afghanistan dan Irak.

Dalam perang melawan terorisme yang dikumandangkan oleh Amerika Serikat sesungguhnya perang utama yang harus dimenangkan adalah persepsi global tentang siapa yang disebut teroris dan siapa yang berhak untuk mengadili dan menghukum mereka. Proses ini harus dimenangkan terlebih dahulu oleh Amerika Serikat sehingga bisa mengajak negara di berbagai belahan dunia manapun untuk mendukung aksi mereka. Secara massif Amerika Serikat mengkampanyekan perang melawan terorisme melalui beragam saluran komunikasi. Perang melawan terorisme menjadi jargon dari setiap kegiatan diplomasi. Materi kampanye setiap kandidat presiden di Amerika Serikat selalu menekankan perang melawan terorisme.

Sebagai sebuah negara yang memegang peran di berbagai belahan dunia menjadi wajar jika Amerika Serikat bisa mengontrol isu terorisme sehingga berbagai pemberitaan media massa di seluruh penjuru dunia sepakat dengan definisi teror, teroris dan tindakan apa yang harus dilakukan. Sebagai contoh ketika Amerika Serikat menyerang Afganistan untuk menghancurkan Al Qaeda efeknya tidak hanya dirasakan oleh kelompok tersebut melainkan juga penderitaan dari warga Afganistan. Dunia tidak melakukan protes keras apalagi upaya untuk menghalangi tindakan Amerika Serikat menyerang Afganistan. Kata kuncinya terletak dari

keepakatan berbagai negara dari seluruh dunia terhadap definisi perang melawan terorisme. Hal ini nampak bahwa kemampuan mengontrol arus informasi dalam melakukan propaganda melawan terorisme berhasil mereka lakukan.

Keterlibatan media dalam menyebarkan informasi, menyebarkan gagasan, melakukan amplifikasi dari ideologi dominan memegang peran penting bagi tersebarnya doktrin perang melawan teroris. Sekilas nampak bahwa kemenangan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya dalam menyebarkan isu terorisme menjadi bukti dominasi mereka dalam mengontrol media. Di sisi lain ternyata berbagai kelompok teroris juga secara sadar memanfaatkan media untuk beragam kepentingan. Oleh karena itu menarik untuk dikaji bagaimana kelompok yang disebut teroris menunjukkan eksistensi dalam memanfaatkan media? Hubungan media dan terorisme? Peran media dalam melanggengkan dan menyebarkan ideologi teror? Bagaimana seharusnya posisi media dalam pemberitaan terorisme sehingga bisa memberikan kontribusi positif bagi ketahanan nasional?

B. Teror dan terorisme

Istilah terorisme berkaitan dengan kata *teror* dan *teroris*. Secara semantik leksikal, teror berarti kekacauan; tindak kesewenang-wenangan untuk menimbulkan kekacauan dalam masyarakat; tindak kejam dan mengancam. Kata terorisme berasal dari bahasa Perancis *le terreur* yang semula dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintah hasil Revolusi Perancis yang mempergunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan dengan cara memenggal 40.000 orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah. Terorisme juga dipergunakan untuk menyebut gerakan kekerasan anti pemerintah di Rusia. Kata terorisme sejak awal dipergunakan untuk menyebut tindakan kekerasan oleh pemerintah maupun kegiatan yang anti pemerintah. Istilah teroris berarti pelaku aksi teror yang bisa bermakna jamak maupun tunggal. Terorisme diartikan sebagai paham yang gemar melakukan intimidasi, aksi kekerasan, serta berbagai kebrutalan terhadap masyarakat sipil berdasarkan latar belakang, sebab dan motif tertentu (Fanani, 2009:366).

Dalam perkembangan bahasa Arab dewasa ini, kata teror atau teroris ditunjuk dengan kata yang seakar dengan kata “*rahiba*”, yakni “*irhab*”. Kata “*irhab*” dipakai untuk menunjuk aksi terorisme. Namun, menurut Quraish Shihab, pengertian simantik “*rahiba*” bukan seperti yang dimaksud oleh kata itu sekarang ini. Quraish Shihab menyatakan bahwa yang digentarkan atau dibuat takut (*turhibun*), sebagaimana yang dimaksud QS al-Anfal [8]: 60, bukanlah masyarakat umum, bukan juga orang-orang yang tidak bersalah. Tetapi mereka yang menjadi musuh Allah SWT dan musuh masyarakat (Shihab,2002:486). Menurut Wilkinson, terorisme adalah penggunaan pembunuhan, kekerasan, kerusakan, ancaman dan sejenisnya secara sistematis untuk menimbulkan suasana mencekam, mempublikasikan ideologi dan mempengaruhi target yang luas agar mengikuti tujuan pelaku terror (Wilkinson, 2005:9).

Abu Muhammad AF dalam *Webster New School and Office Dictionary, A Fawcett Crest Book* membagi terorisme dengan dua pendefinisian. Pertama, terorisme sebagai kata benda dan kedua, sebagai kata kerja. Terorisme sebagai kata benda adalah *extreme fear* berarti ketakutan yang teramat sangat, bisa juga diartikan *one who excites extreme fear* yang berarti seseorang yang gelisah dalam ketakutan yang teramat sangat. Arti lain adalah *the ability to cause such fear*, yakni kemampuan untuk menimbulkan ketakutan, atau mengancam, atau memaksa dengan teror atau ancaman teror. Sebagai kata kerja, terorisme dapat diartikan sebagai penggunaan kekerasan, ancaman dan sejenisnya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau tujuan dari suatu system pemerintahan yang ditegakkan dengan teror (Pribadi dan Rayyan, 2009: 10-11).

C. Hubungan Media dan Terorisme

Panic at the Disco, “*The only difference between martyrdom and suicide is the press coverage*”. Kutipan lirik lagu tersebut relevan untuk melihat hubungan antara media dan terorisme.

Di berbagai belahan dunia peristiwa teror dan pelakunya menjadi bahan berita yang menarik bagi media. Fenomena Al Qaeda dan Usamah Bin Ladin menjadi materi berita yang

menarik bagi media di berbagai belahan dunia. Di Filipina, Kelompok Abu Sayyaf dan Pejuang Moro adalah dua kelompok yang menjadi sasaran pemberitaan terkait kegiatan terorisme. Di Indonesia, Jamaah Islamiyah dan Noordin M Top menjadi bahan pemberitaan setiap kali terjadi peristiwa pemboman. Terorisme dan media memiliki kaitan erat dalam hubungan simbiosis mutualis meski tidak bersifat langsung. Media membutuhkan bahan berita yang menarik khalayak, di sisi lain para pelaku teror membutuhkan publisitas untuk menunjukkan eksistensi atau menyebarkan alasan ideologis dibalik aksi teror yang mereka lakukan. Meski demikian penayangan para korban teror atau pelaku teror secara berlebihan dianggap menghadirkan teror baru bagi pemirsa. Sebagai contoh, potongan kepala pelaku Bom Mega Kuningan yang diberitakan berkali-kali oleh media telah mengundang kritik dari berbagai pihak.

Fakta bahwa teroris memanfaatkan media dapat ditarik jauh ke belakang, antara lain ke kasus pembunuhan Empress Elizabeth (Tuchman, 1972). Pelakunya, Luchini, seorang yang gemar melakukan kliping berita, menyatakan: "Saya telah lama ingin membunuh orang penting agar bisa masuk koran!" Pada tataran teoritis, hal ini dinamakan *a violent communication strategy*. Pelaku teror bertindak sebagai sender, para korban menjadi *message generator*, dan *receiver* adalah kelompok yang dianggap musuh atau publik secara luas. (Ghozali, Kompas/07-08-2003). Brian Jenkins mengungkapkan bahwa terorisme adalah produk dari kebebasan pers. Walter Laqueur sependapat dengan pernyataan Jenkins dan menyebut media sebagai teman baik teroris karena tanpa publisitas aktifitas mereka tidak berarti (Biernatzki, 2002:5)

Media massa dan terorisme adalah simbiosis mutualis yang saling menguntungkan satu sama lain. Kelompok teror membutuhkan publikasi sementara media membutuhkan berita yang memiliki nilai informasi tinggi. Grant Wardlaw menyatakan, terorisme merupakan sebuah komoditas yang bisa diekspor, *terrorism is now an export industry*. Terorisme ibarat industri yang bisa dikembangkan di mana-mana. Industri itu, menurut Collin Wilson dan Donald Seamen, sebagai *the world's most sinister growth industry* (industri kekejaman dunia yang paling

berkembang) (Mc Alister, 2002). Terorisme memiliki nilai berita yang tinggi karena dramatisasi yang berlangsung secara alami (Gadarian, 2010:471-472).

Studi yang dilakukan oleh Schmid and de Graaf, 1982, Schlesinger, 1991, Nacos, 1994, Lockyer, 2003, Norris, Kern and Just, 2004 menunjukkan bahwa hubungan media dan teroris bersifat simbiotik. Pemanfaatan secara aktif meliputi: mengomunikasikan pesan-pesan ketakutan kepada khalayak luas; mempolarisasi pendapat umum; mencoba menarik anggota baru pada gerakan teroris; mengecoh musuhnya dengan menyebarkan informasi palsu; mengiklankan diri dan menyebabkan mereka merasa terwakili; membangkitkan keprihatinan publik terhadap korban untuk menekan agar pemerintah melakukan kompromi atau konsesi; mengalihkan perhatian publik dari isu-isu yang tidak dikehendaki dengan harapan berita teror mereka mengisi halaman depan media; dan membangkitkan kekecewaan publik terhadap pemerintah. Teroris memanfaatkan reportase media untuk mencapai target politik global (Alkarni, 2005:3).

Kajian dari Soriano menjelaskan bagaimana hubungan antara media dan terorisme. Soriano memulai eksplorasinya tentang hubungan antara media dan terorisme dengan menggunakan kata dari Marshall McLuhan, "*without communication, terrorism would not exist*". Pemikiran terorisme membutuhkan peran dari media untuk mewujudkan eksistensinya. Melalui media, pesan teroris dapat disebarluaskan lebih cepat dan lebih meyakinkan. Menurut Brigitte Nacos ada tiga tujuan utama teroris yang berlaku secara universal yaitu: menarik perhatian, mendapat pengakuan, dan mendapat penghormatan serta pengesahan. Tujuan-tujuan tersebut merujuk pada simbiosis hubungan antara media dan teroris. Brigitte Nacos menggabungkan aspek-aspek tujuan tersebut menjadi sebuah kerangka kerja dimana teroris memiliki empat ketergantungan umum terhadap media ketika mereka melakukan serangan. Keempat kerangka kerja tersebut adalah *gain attention and awareness of the audience, recognition of the organization's motives, gain the respect and sympathy*, dan *gain a quasi-legitimate status and a media treatment similar to that of legitimate political actors* (Soriano, 2008:1-20). Yonah Alexander mengungkapkan bahwa teroris memanfaatkan media untuk mendapatkan perhatian,

pengakuan, keabsahan mereka sebagai organisasi teror (Alexander et al, 1979:162 dalam COT, 2008: 3).

Kerangka kerja pertama adalah *Gaining Attention and Awareness; Spreading Fear* yakni sebuah upaya untuk mendapat perhatian publik dengan cara menyebar ketakutan. Tindakan para teroris yang bersifat lokal bisa tersebar secara nasional bahkan internasional dengan pemberitaan media. Penyebaran berita yang memuat pesan para teroris menunjukkan peran penting media dalam mendukung aksi teror. Strategi untuk mendapat perhatian merujuk pada upaya menunjukkan pentingnya tindakan para teroris, mengintimidasi pemirsa, pemerintah dan pengambil keputusan politik melalui ketakutan yang disebar (COT, 2008: 3).

Tujuan kedua adalah *recognition of motives*. Tujuan ini secara konsep berhubungan dengan agenda setting dan framing. Teroris tidak hanya ingin diketahui oleh audiens tetapi juga menyampaikan pesan dan motif dibalik tindakan mereka. Tindakan bom bunuh diri yang digunakan para teroris akan menimbulkan pertanyaan di benak audiens tentang motif tindakan mereka. Media melalui *frame* pemberitaan yang dikembangkan akan memberikan penjelasan mengenai motif yang dimiliki oleh para teroris tersebut. Tujuan ketiga adalah *gaining respect and sympathy*. Audiens yang menyaksikan tindakan teroris bukan hanya audiens yang bisa ditakuti tetapi juga mereka yang secara potensial akan mendukung aksi teror yang terjadi. Kelompok yang memiliki akar ideologi serupa atau memiliki tujuan yang sama dengan para pelaku teror berpotensi untuk memberikan rasa hormat dan simpati. Tujuan keempat dari teroris dalam menggunakan media adalah *gaining legitimacy*. Ketika teroris secara rutin tampil di media, mereka memposisikan diri sebagai wakil resmi dari kelompoknya. Audiens bisa setuju dengan tindakan teroris atau justru menolak, namun mereka akan melihat bahwa kelompok teroris tersebut menjadi wakil dari kepentingan tertentu. Kelompok teroris seolah mendapat pengesahan dari para pendukung mereka yang mendapat informasi melalui media. (COT, 2008: 10).

Pemanfaatan secara aktif menunjukkan bagaimana upaya para teroris memanfaatkan media untuk mendapatkan efek nyata dari tindakan mereka. Selain penggunaan media secara aktif, teroris juga menggunakan media secara pasif diantaranya: sebagai jaringan komunikasi eksternal di antara teroris; mempelajari teknik-teknik penanganan terbaru terhadap terorisme dari laporan media; mendapat informasi tentang kegiatan terkini pasukan keamanan menghadapi teror yang sedang mereka lakukan; menikmati laporan media yang berlebihan tentang kekuatan teroris hingga menciptakan ketakutan pihak musuh dan mencegah keberanian polisi secara individual; mengidentifikasi target-target selanjutnya; dan mencari tahu reaksi publik terhadap tindakan mereka.

Hubungan antara media dan teroris tidak hanya nampak pada penggunaan media untuk kepentingan para teroris. Di sisi lain, media menggunakan teroris untuk kepentingan mereka. Tragedi berdarah, peristiwa yang menarik perhatian dan sisi dramatis dari aksi teror selalu menjadi komoditi yang bertiras tinggi bagi media. Ada beberapa hal yang bisa menjelaskan bagaimana media menggunakan teroris untuk kepentingan mereka, pertama, *Exacerbating factors: Competition and Speed*. Wilkinson and Ockrent menyebutkan dua faktor penting dari perubahan kerja media yaitu kompetisi dan kecepatan. Kompetisi dan kecepatan menuntut media bekerja dengan lebih baik agar bisa bersaing. Dalam kompetisi, materi berita yang menarik akan menentukan kemampuan untuk menarik audiens. Kecepatan menuntut media untuk mendapat berita dari sumber pertama dalam tempo yang singkat. Aksi terorisme menjadi materi menarik bagi pemberitaan sekaligus membutuhkan kecepatan untuk menyiarkannya. Oleh karena itu media berlomba untuk mendapatkan kesempatan pertama dalam pemberitaan terorisme. Ada dua hal yang berkumpul secara bersamaan yaitu kasus yang menarik dan isu global yang dibicarakan di berbagai negara (COT, 2008: 16-17). Teori agenda setting dan framing bisa menjelaskan bagaimana kaitan antara terorisme dan media. Dalam agenda setting semakin besar perhatian media terhadap suatu fenomena maka semakin besar perhatian masyarakat terhadap fenomena tersebut. Framing menjelaskan bagaimana media menyajikan

suatu berita akan mempengaruhi bagaimana audiens mengartikan dan memahami fenomena yang diberitakan.

Relasi antara kepentingan propaganda teroris dengan kepentingan nilai berita dari media bertemu dalam formulasi teks yang lahir. Hubungan simbiosis antara media dan teroris dalam formulasi teks nampak dalam pemberitaan yang menjadikan topik tersebut sebagai agenda utama. Media membutuhkan isu terorisme sebagai berita utama, sementara teroris berusaha untuk menjadi agenda utama dari pemberitaan media. Bertemunya dua kepentingan antara teroris dan media memberikan pengaruh bagi persepsi publik dan reaksi pemerintah dalam menangani terorisme.

Beberapa organisasi teror memberikan penghargaan kepada para pengikutnya yang berani melakukan aksi bom bunuh diri. Propaganda organisasi teroris dilakukan menggunakan media massa, website, poster dan pamflet untuk memberikan semangat kepada para pengikutnya. Sebagai contoh Macan Tamil di Srilanka memberikan nama khusus kepada pengikutnya yang melakukan serangan bom dengan sebutan pahlawan. Masyarakat di Palestina mengadakan turnamen sepakbola dengan nama pelaku bom bunuh diri sebagai nama piala. Hamas di Lebanon mengadakan pemilihan "*martyr of the month*" yang menjadi kalender rutin organisasi tersebut. Beragam acara dari organisasi teror tersebut dipublikasikan melalui media massa untuk menunjukkan eksistensi kelompok, menyebarkan kebanggaan sebagai anggota kelompok dan membakar semangat para anggota untuk bertindak sesuai ideologi yang mereka anut. Muaranya adalah sebuah realitas bahwa publikasi melalui media massa dianggap sebagai sarana efektif untuk beragam kepentingan yang ingin mereka capai (Gill, 2007: 146-147)

Di Indonesia para pelaku bom bunuh diri membuat rekaman untuk mempengaruhi opini masyarakat. Mereka memanfaatkan internet, Imam Samudera membuat buku "Aku Melawan Teroris", untuk menunjukkan ideologi sekaligus menyebarkan ajaran yang mereka yakini sebagai sebuah kebenaran. Al Qaeda yang selama ini dianggap sebagai organisasi teror terbesar secara terorganisi memanfaatkan media untuk beragam kepentingan. Al-Qaeda memiliki

beragam strategi publikasi yang meliputi pernyataan melalui faksimili, posting di internet, rekaman wawancara dalam bentuk audio dan video serta beragam artikel yang mereka tulis di berbagai media. Beragam publikasi tersebut bermanfaat untuk membentuk solidaritas global dan memperluas area konflik yang mendukung kepentingan Al Qaeda (Fucito, 2006:6). Fawaz Gerges, 2005 menyebut bahwa Usama Bin Ladin adalah orang yang terobsesi dengan publikasi internasional, hal ini dibenarkan oleh AL Zawahiry yang menyebut bahwa separuh pertempuran terjadi di media massa (COT, 2008:4).

Ketika jurnalis melakukan reportase untuk mendapatkan informasi seputar terorisme, maka ia memiliki kemungkinan untuk menggunakan beragam istilah yang biasa digunakan oleh kelompok teroris. Istilah tersebut kemudian tersebar ke berbagai penjuru dunia karena pemberitaan media. Secara tidak langsung sebenarnya disinilah peran media untuk menyebarkan ideologi teroris yang mereka liput. Istilah bukanlah sekedar kata mati melainkan sarat makna ideologis. Berikut contoh tatanama yang digunakan untuk menyebut tindakan pelaku teror dan nama yang digunakan oleh pelaku teror terhadap kegiatan mereka.

Label dari Media	Teroris Menamai Aktifitas mereka
Criminal	Revolutionary
Terorist	Guerrilla
Murderer	Freedom Fighter
Gang	Army
Subversive element	Liberator
Bloodbath	Purge
Lunatic	Martyr
Mercenary	Soldier
Threat	Warning
Aggression	Preventive Counter Strike
Assassin	Avenger
Propaganda	Communiqué
Extremist Fanatic	Dedicated Anti-Imperialist
Attack	Operation
Hired Killer	Example of Revolutionary Solidarity
Murder	Revolutionary Justice

Sumber: (Lockyer, 2003:2)

Istilah-istilah penting yang sering digunakan oleh organisasi teror tersebar ke seluruh penjuru dunia dan membawa pesan ideologis. Sebagai contoh istilah “pengantin” yang

digunakan oleh kelompok Noordin M Top tersebar melalui pemberitaan media Indonesia. Istilah “pengantin” berarti seseorang yang merelakan dirinya mati sebagai pengebom bunuh diri sesungguhnya sedang dipersiapkan untuk menjadi suami bidadari di surga. Ideologi jaringan ini tersebar dan menginspirasi banyak pemuda untuk menjadi “pengantin”. Para pelaku teror menyadari pentingnya penyebaran ideologi mereka guna mendapatkan dukungan dan simpati dari publik. Guna mendukung kepentingan tersebut mereka memberikan kesempatan bagi media untuk melakukan liputan dan wawancara seputar aktifitas mereka.

D. Bagaimana seharusnya posisi media

Kecurigaan terhadap adanya interdependensi teroris dan media ditegaskan oleh Giessmann (2002: 734-136), menurutnya kelompok teroris mencari perhatian media untuk sebisa mungkin mendapatkan penerimaan publik. Kelompok teroris kerap mengusung sensasi - sebagai nilai berita yang mereka manipulasi untuk tujuan propaganda. Media massa, lebih lanjut, menerima bentuk simbiosis ini demi untuk mendapatkan gambar-gambar yang menarik dan berita-berita yang mengejutkan serta menjadi *leading newspaper* terhadap kompetitornya. Padahal idealnya, menurut Giessmann, media massa memiliki kesempatan dan tanggung jawab untuk membatasi persebaran terorisme dengan pemberitaan yang lebih bersandar pada kesadaran moral dan reportase yang dipilah-pilahkan (Prajarto, 2004:40).

Persidangan Anders Behring Breivik yang dilakukan di Oslo, Norwegia mengungkapkan sebuah pengakuan yang mengejutkan. Breivik mengaku belajar melakukan teror dari majalah online yang diterbitkan Al Qaeda dan film dokumenter tentang Irak dan Afghanistan. Breivik adalah pelaku pembunuhan terhadap tujuh puluh tujuh orang di Oslo Norwegia pada Juli 2011 lalu. Ia mengaku bahwa tindakannya terinspirasi dari penyerangan Oklahoma dan World Trade Centre pada 2001. Breivik menyebut Al Qaeda sebagai teroris paling sukses sehingga layak ditiru strateginya. Dalam kurun waktu 2006 sampai 2011 Breivik mengikuti Al Qaeda dan mempelajari cara melakukan teror. (www.CNN.com/20/4/2012).

Berkaca dari kasus tersebut maka peran media dalam pemberitaan terorisme diharapkan tidak menimbulkan eksese negatif bagi pemirsa. Pemberitaan media tidak menimbulkan keinginan dari orang yang menonton berita tersebut untuk meniru. Berita media juga diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari amplifikasi penyebaran ideologi teror. Upaya menghalangi kerja media dengan melarang memberitakan kasus terorisme tentu tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan kebebasan pers. Melarang media untuk memberitakan kasus terorisme berarti menghalangi hak kebebasan memperoleh informasi yang ada pada setiap individu.

Beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan oleh awak media ketika meliput berita terorisme adalah:

- The critical imperative

Penulis revolusioner Cina, Lu Xun menyatakan bahwa peran penting dari seorang penulis adalah untuk member kritik. Mark Blaisse mengkritik perilaku dari media yang hanya mengedepankan profit dari pemberitaan. Semestinya pemberitaan media haruslah menjadi kritik bagi setiap peristiwa yang mereka liput. Dalam kasus terorisme pemberitaan media yang hanya mengedepankan aspek bisnis semata tidaklah pantas untuk dilakukan. Media harus bisa memberikan kritik dan masukan bagi pemerintah dan masyarakat bagaimana menyikapi kasus terorisme (Biernatzki, 2002:20)

- Interviewing terrorists

Organisasi teror biasanya akan mengundang media untuk melakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh mereka sehingga mendapatkan publikasi yang luas. AL Qaeda secara rutin mengundang media untuk mewawancarai tokoh mereka. Mayor Alfredo Stefano yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Timor Leste mengundang Metro TV untuk mewawancarainya. Pada kondisi ini jurnalis akan mengalami dilemma terkait dengan keyakinan dan pengalaman hidup yang dia alami. Nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi bagaimana wawancara dilakukan, materi pertanyaan dan berita yang dihasilkan.

Jurnalis yang melakukan wawancara dengan teroris seringkali tidak sadar telah masuk dalam pemahaman ideologi mereka. Empati, toleransi, pengertian dan ketertarikan yang muncul dalam proses wawancara secara perlahan menggiring jurnalis ketika menuliskan berita tentang terorisme. Dalam contoh peristiwa Mayor Alfredo Stefano yang ditayangkan di Metro TV, pemirsa di rumah juga bisa terbawa secara emosional kedalam penjelasan logis yang disampaikannya. Oleh karena itu mewawancarai teroris memerlukan kemampuan khusus dari seorang jurnalis sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi audiens.

Pada tahun 1997 ketika Peter Bergen seorang jurnalis CNN mewawancarai Usama Bin Ladin dari Afghanistan ia menyadari bahwa Bin Ladin adalah seorang yang sangat memahami bagaimana caranya melakukan wawancara dengan media. Bin Ladin meminta daftar pertanyaan yang akan diajukan dan menyatakan hanya akan menjawab pertanyaan yang sesuai dengan keinginannya (Fucito, 2006:7). Kondisi tersebut menggambarkan bagaimana kemampuan dari tokoh teroris ketika melakukan wawancara dengan media. Tantangan yang dihadapi jurnalis ketika melakukan wawancara dengan mereka adalah kemampuan untuk mendapatkan informasi tanpa terperangkap dalam empati dan ketertarikan berlebih dalam menyebarkan ideologi yang mereka sebarkan.

- Moral obligations of reporting

David L. Paletz and Laura L. Tawney menekankan pentingnya aspek moral dari jurnalis, editor, penyiar, dan awak media lainnya ketika memberitakan kasus terorisme. Awak media harus menyadari bahwa realitas yang mereka liput, materi wawancara dan kronologi yang mereka beritakan akan membawa dampak bagi orang yang membacanya (Biernatzki, 2002:20) .

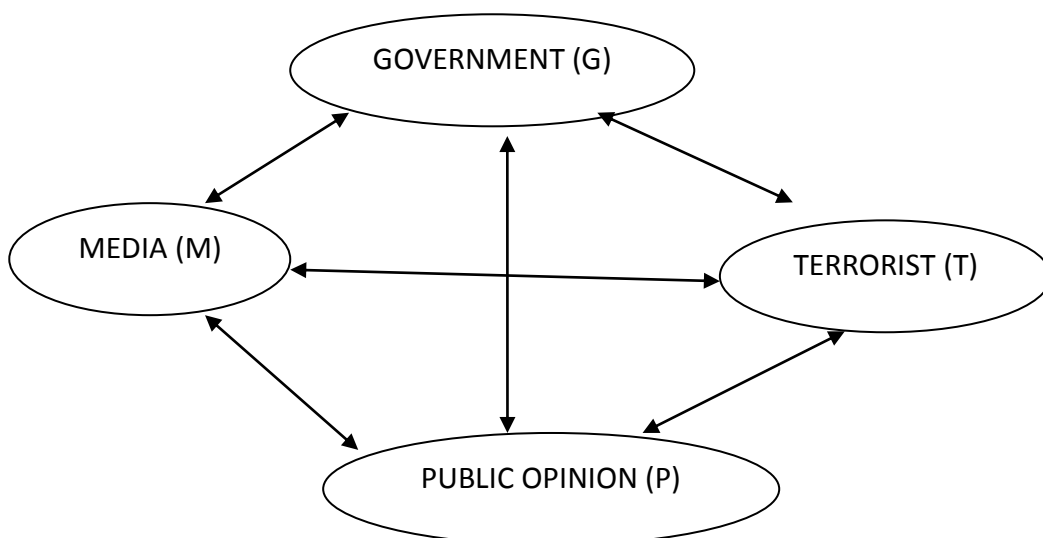
Kebebasan berekspresi yang menjadi salah satu hak asasi manusia yang diakui haruskah menimbulkan sebuah dampak baru bagi penyebaran terorisme. Jalan tengah sangat diperlukan seperti ungkapan dari Direktur Media National Council di Uni Emirat Arab (UAE) Saker Ghabbash yang menyatakan bahwa peran media massa sangat penting sehingga perlu dikembangkan metode kreatif ketika memberitakan terorisme. Awak media perlu mendapatkan

pelatihan tentang isu terorisme sehingga bisa memainkan peran yang nyata bagi upaya mengurangi dampak pemberitaan terorisme di kalangan generasi muda. Pemberitaan terorisme harus disajikan dengan kecerdasan intelektual sehingga memberikan efek kekebalan di kalangan generasi muda dari pengaruh ideologi teroris dan tetap mencintai tanah tumpah darahnya. Melalui media massa perlu dikembangkan pemberitaan yang bisa mengajak generasi muda melakukan beragam aktifitas bermanfaat agar tidak terpengaruh aktifitas teroris (the middle east report, 2010:12).

Ignacio Ramonet mengungkapkan bahwa keberadaan pimpinan media yang datang dari perusahaan besar dan bukan lahir dari jurnalis yang meniti karir dari bawah ditengarai menjadi penyebab ketidakmampuan dari media untuk menghasilkan pemberitaan cerdas (Biernatzki, 2002:6). Terorisme adalah fenomena yang berbeda dengan perang gerilya dan kekerasan yang lain. Media memerlukan kemampuan yang berbeda dalam memberitakan terorisme. Beberapa media menyikapi fenomena terorisme sama dengan kasus perang gerilya dan jenis kekerasan lainnya. Kesalahan ini harus diperbaiki sehingga berita tentang terorisme tidak sama dengan berita yang lain.

Berikut contoh model hubungan antara media, teroris dan pemerintah. Model ini mengembangkan kaitan antara pemerintah, media, organisasi teror dan terbentuknya opini publik. Model ini dikembangkan berdasarkan pengalaman Saudi Arabia dalam kasus terorisme:

The Media-Terrorism Model, Six Billateral Relations



Sumber: (Alkarni, 2005:15-18)

Model ini menggambarkan hubungan bilateral diantara dua kelompok dan setiap hubungan merefleksikan apa yang dibutuhkan dari satu kelompok kepada kelompok lain.

Berikut penjelasan dari model tersebut:

1. MG: media to get information, government to censor information

Media mendapatkan kebebasan untuk memberitakan terorisme. Pemerintah menawarkan pandangan mereka dalam menilai kasus terorisme yang terjadi. Pandangan pemerintah dan kebebasan media untuk menyampaikan informasi disandingkan bersama dalam pemberitaan media

2. MT: media to cover actions; terrorist to manipulate media and get publicity for their cause and issues.

Media meliput dan memberitakan aksi teroris dalam berbagai bentuk seperti pemboman, penculikan, sabotase. Beragam aksi tersebut ditujukan untuk memperoleh publikasi dari media. Teroris berusaha memanipulasi kasus dan isu yang terkait dengan aksi mereka agar mendapatkan simpati publik. Pada kondisi ini pemerintah memberikan kesempatan kepada media untuk mewawancarai pelaku teror yang tertangkap dengan harapan berita yang disampaikan media bisa lebih mudah diketahui dan dikontrol ipemerintah. Para teroris yang tertangkap mendapatkan intimidasi agar memberikan pernyataan positif terhadap pemerintah

3. MP : media to inform the public; the public to understand the whole pictures of events from the media

Media memiliki peran untuk menyebarkan informasi kepada publik sementara publik memahami gambaran terorisme yang dinformasikan oleh media. Ketika publik mengakses informasi terorisme dari media yang berasal dari luar negeri, maka gambaran terorisme yang mereka peroleh berbeda dengan harapan dari media lokal.

4. TG: terrorists to change government policies; government to stop violence.

Teroris berusaha mempengaruhi kebijakan politik pemerintah melalui beragam aksi teror yang mereka lakukan. Di sisi lain pemerintah berusaha menghentikan segala bentuk kekerasan dan aksi teror. Peran media dalam proses delegitimasi terorisme sangat dibutuhkan agar aksi teror tidak ditiru oleh generasi muda.

5. TP: terrorists to use the public as a means to pressurize governments; the public to feel safe and express dissatisfaction with the violent actions of terrorists and encourage them to use peaceful means to achieve their objectives.

Dukungan dari publik terhadap keamanan nasional sangat dibutuhkan oleh negara. Pemerintah mengharapkan adanya keamanan dan ketentraman di masyarakat. Pada kondisi ini media bisa membantu mengembangkan pemberitaan yang mengarahkan semua pihak agar menggunakan cara damai untuk mencapai tujuan mereka. Karena itu tindakan teroris menggunakan kekerasan tidak bisa diterima.

6. GP: government to convince the public to be calm and to be disassociated from terrorists; the public seek accurate information from the government.

Publik berusaha untuk mencari informasi yang akurat dari pemerintah tentang kondisi yang sedang terjadi. Karena itu pemerintah berusaha untuk meyakinkan public agar mempercayai kebijakan yang telah digulirkan dalam menyelesaikan kasus terorisme.

Model tersebut memberikan gambaran bahwa kasus terorisme merupakan ancaman nyata bagi keamanan nasional suatu bangsa. Karena itu perlu kerjasama dari berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan ini. Beragam kepentingan antara media, teroris, pemerintah dan publik menggambarkan kompleksitas hubungan diantara mereka. Berikut tingkatan partisipasi teroris dalam proses pembentukan berita media (COT, 2008:18-19):

1. Ketika teroris melakukan aksinya seperti pemboman, maka mereka akan menunggu bagaimana reaksi media terhadap aksi tersebut. Mereka berusaha mempengaruhi berita media dengan memilih target, menentukan lokasi, dan waktu

agar menghasilkan efek yang dramatis. Meski demikian mereka tidak terlibat dalam menuliskan berita di media. Pada kondisi ini media memegang peran sendiri dalam menuliskan berita tentang aksi teroris.

2. Teroris mengirimkan rekaman video, press release, dan bentuk publikasi lain ke media. Teroris menentukan diksi, konstruksi pemberitaan, memilih actor dan berharap media memberitakan sesuai keinginan mereka. Proses *gatekeeping* yang ada di media akan berperan besar menentukan bentuk berita yang muncul. Beberapa media memilih untuk menyangkan pernyataan teroris secara utuh untuk menunjukkan orisinalitas dan menjaga objektivitas pemberitaan. Media lain memilih melakukan sensor agar berita yang tampil sesuai kebijakan redaksional.
3. Teroris memiliki kemampuan penuh untuk mengontrol berita media. Beberapa cara yang mereka lakukan adalah dengan membuat media sendiri atau memaksa media dengan cara kekerasan. Cara kekerasan yang ditempuh adalah dengan menculik jurnalis dan memaksa mereka untuk memberitakan sesuai keinginan.

Graber, 2004 mengajukan tiga konsep berkaitan dengan pemberitaan peristiwa yang menyangkut keamanan nasional. Konsep ini menjelaskan hubungan antara media dan pemerintah dalam menyikapi fenomena tersebut. Ketiga konsep tersebut adalah, *the formal censorship, the free press approach, and the informal censorship approach* (AlKarni,2005:4) .

1. The formal censorship

Pemerintah menentukan materi berita yang boleh dipublikasikan oleh media. Bentuk sensor ini sarat muatan ideologis dan kepentingan dari penguasa. Berkaitan dengan isu keamanan nasional, pemerintah berhak menentukan materi pemberitaan media. Bentuk sensor diwujudkan dalam undang-undang, peraturan, pengawasan langsung dari aparat pemerintah.

2. The free press approach

Jurnalis dan media diberikan kebebasan seluas-luasnya tanpa batasan ketika memberitakan isu yang berkaitan dengan keamanan nasional. Pemerintah tidak melakukan sensor dalam bentuk apapun. Audiens dianggap sudah cerdas dan mampu memilah isi pemberitaan sehingga tidak membahayakan keamanan nasional.

3. The informal censorship approach

Pemerintah tidak melakukan sensor secara formal dalam bentuk apapun. Media diberikan ruang dan kebebasan untuk memberitakan isu yang terkait keamanan nasional. Pihak internal media memiliki batasan dan tanggungjawab moral kepada masyarakat dalam menentukan materi berita. Pemerintah mengembangkan diskusi yang sehat dengan media dalam membahas isu-isu yang berkaitan dengan keamanan nasional.

Pada kasus pemberitaan terorisme di Indonesia, model manakah yang paling tepat?. Model pertama pernah diterapkan di masa orde baru ketika kebebasan pers dikekang. Setiap pemberitaan yang menyangkut keamanan nasional harus mendapat persetujuan pemerintah. Jika model ini kembali diterapkan di Indonesia maka kekhawatiran akan matinya kebebasan pers bisa terwujud. Model kedua yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada pers dalam memberitakan terorisme sekilas menjadi wujud dari kebebasan pers dan pemenuhan hak mendapatkan informasi bagi masyarakat. Persoalannya apakah audiens sudah benar-benar cerdas dalam membaca berita media, atau justru kebebasan tersebut dijadikan celah para pelaku teror untuk menyebarkan ideologi mereka.

Media diberi kebebasan untuk memberitakan apapun termasuk menyebarkan ideologi teror, cara melakukan teror, kronologi, jenis senjata dan teknik melakukan teror. Informasi ini tentunya sangat berbahaya jika dibaca oleh audiens yang memiliki kecenderungan ideologi sama dengan pelaku teror. Mereka bisa meniru pola dan cara melakukan teror dengan belajar dari pemberitaan media. Fenomena Anders Behring Breivik yang meniru dan mengagumi AL Qaeda

bisa terulang kembali. Keamanan nasional adalah kepentingan bersama termasuk kepentingan dari kebebasan.

Model ketiga yang menekankan pentingnya tanggungjawab moral dan kecerdasan media dalam memberitakan isu yang sensitif membutuhkan kecerdasan dan kemampuan dari awak media. Mereka yang menentukan proses *news gathering, producing* dan menyebarkan berita. Karena itu peran dan tanggungjawab media dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan nasional adalah sebuah keniscayaan. Sebuah studi dari Jimirro Center for the Study of Media Influence at Penn State University menunjukkan bahwa dua pertiga rakyat Amerika Serikat dipengaruhi oleh pemberitaan media ketika menempatkan terorisme sebagai isu keamanan nasional. Meski demikian media tidak efektif untuk merubah perilaku dan kebiasaan masyarakat agar menyiapkan diri menghadapi serangan teroris. Meskipun pemberitaan media secara jelas menunjukkan kengerian dan bahaya dari tindakan teroris, namun masyarakat tidak merubah perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari ((Major, 2003 dalam Alkarni, 2005:6)

Salah satu negara yang sering berurusan dengan terorisme adalah India. Pemboman, sabotase, penculikan dan beragam aksi teror sering terjadi di negara ini. India adalah salah satu negara yang mengembangkan “*non military approach of terrorism*” meliputi pendekatan politik, ekonomi, psikologi, dan social ketika menghadapi kasus terorisme. India membagi terorisme menjadi lokal dan internasional. Ketika terjadi serangan terhadap suatu tempat pemerintah India memperhitungkan pemberitaan yang muncul tentang kasus tersebut. Mereka mengadakan penelitian berapa banyak audiens yang menerima terpaan berita terorisme dan materi apa yang mereka konsumsi. Pemerintah India berusaha untuk menanggapi setiap propaganda yang menguntungkan kelompok teroris. Pemerintah India juga membuat materi pemberitaan agar kelompok teroris dan pimpinannya tidak menjadi idola dikalangan masyarakat (Raman, 2003 dalam Alkarni, 2005:5).

Beberapa contoh penanganan pemberitaan terorisme di negara lain bisa menjadi pelajaran untuk menerapkan model yang tepat bagi Indonesia. Sebagai sebuah negara yang

sering berurusan dengan kasus terorisme, pendekatan yang tepat untuk memberitakan kasus ini menjadi kebutuhan mendesak.

E. Penutup

Media sesungguhnya berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam. Isi media tidak hadir begitu saja melainkan melalui mekanisme tarik menarik kepentingan internal dan eksternal yang kuat. Apa yang tersaji di media bukanlah realita yang sesungguhnya melainkan formulasi kerja redaksional yang menghadirkan kembali realitas dalam wajah yang lain. Media melalui formulasi tersebut menghadirkan realitas baru yang telah mengalami penambahan, pengurangan, perbaikan, penghapusan atau bahkan distorsi dari realitas sesungguhnya. Alih-alih menghadirkan realitas obyektif, isi media justru sarat dengan berbagai kepentingan yang melingkupinya.

Mengurangi dampak pemberitaan terorisme di kalangan generasi muda adalah sebuah tanggungjawab yang harus dipikul oleh media. Awak media yang berkaitan dengan pemberitaan tentang terorisme perlu memiliki kesadaran dan kemauan kuat untuk mengurangi dampak buruk berita yang mereka buat. Kronologi, tata cara melakukan aksi, cara menggalang dana dan ideologi teroris tidak perlu diberitakan secara detail beserta ilustrasi yang bisa dicontoh. Materi berita bisa diganti dengan strategi kontra terorisme yang berisi penguatan semangat nasionalisme, kesetiakawanan, menghargai perbedaan, dan mengalihkan perhatian generasi muda agar tidak mencontoh tindakan teroris.

Terorisme bisa dikurangi dampaknya jika media mampu menyajikan pemberitaan yang cerdas dan sehat. Bagi Indonesia yang selama ini menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya terorisme kemampuan media dalam membantu ketahanan nasional sangat dibutuhkan. Pemberitaan tentang terorisme harus disajikan dalam kerangka untuk menjaga ketahanan nasional dan menghindari efek negatif yang menginspirasi pelaku teror lainnya.

Pada akhirnya kemampuan media untuk menyikapi kasus terorisme dengan pemberitaan cerdas sangat dibutuhkan agar kebebasan pers tetap terjaga tanpa harus menimbulkan dampak buruk dengan lahirnya teroris baru yang terinspirasi pemberitaan media.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Pribadi dan Abu Rayyan, 2009, *Membongkar Jaringan Teroris*, Jakarta:Abdika
- Alkarni, Ali, 2005, *A Media/Terrorism Model The Saudi Experience*, dipresentasikan di International Association for Media & Communication Research, TAIPEI, 2005
- Akhmad Fanani, 2009, *Kamus Istilah Populer*, Yogyakarta: Mitra Pelajar
- Biernatzki, William E. 2002, *Terrorism and Mass Media*, Centre for the Study of Communication and Culture: Santa Clara University
- Hoffman, B. (2006), *Inside Terrorism (Revised and Expanded Edition)*, New York: Columbia University Press.
- Gadarian, Kushner, Shana, 2010, *The Politics of Threat: How Terrorism News Shapes Foreign Policy Attitudes*, *The Journal of Politics*, Vol. 72, No. 2, April 2010, Pp. 469–483
- Ghozali, Effendi, 2003, *Without media there can be no terrorism*, dimuat di Kompas, 07-08-2003
- Gill, Paul, 2007, *A Multi-Dimensional Approach to Suicide Bombing*, School of Politics and International Relations, University College Dublin: Ireland, *IJCIV* : Vol. 1 (2) 2007, hal: 146-147
- Mc Alister, Melanie, menulis tentang *A Cultural History of The War Without End* dimuat di *The Journal of American History*, September 2002
- Lockyer, Adam, 2003, *The Relationship Between The Media And Terrorism*, The Australian National University
- Manuel R. Torres Soriano, “Terorism and the Mass Media after Al Qaeda: A Change of Course?”, *Athena Intelligence Journal* Vol. 3, No 1, (2008), pp. 1-20.
- Prajarto, Nunung, 2004, *Terorisme dan Media Massa: Debat Keterlibntan Media*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 8, Nomor 1, Juli 2004. Hal:37-52
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid. 5
- Terrorism and The Media*, 2008, COT Institute, Netherland hal: 3.
- The Middle East Reporter* Wednesday January 6, 2010